



ANALISA AKUNTABILITAS INTERNATIONAL NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION: STUDI KASUS BRAC

Muhammad Aditya Purnomo*, Muhammad Iqbal Yunazwardi

¹Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Sriwijaya

Email*: muhammadadityapurnomo@fisip.unsri.ac.id

Abstrak. BRAC merupakan organisasi non-pemerintah (NGO) yang fokus pada akuntabilitas dalam hubungan dengan pemerintah, donor, dan masyarakat. Akuntabilitas BRAC terhadap pemerintah ditunjukkan melalui kepatuhan terhadap regulasi, penerbitan laporan tahunan, dan kerjasama erat dengan NGO Affairs Bureau of Bangladesh (NGOAB). Akuntabilitas terhadap donor diwujudkan melalui transparansi keuangan dan laporan kinerja yang mendorong pembentukan departemen kontrol internal. Selain itu, BRAC berupaya mencapai akuntabilitas sosial dengan melibatkan masyarakat lokal melalui program-program seperti Outreach, RCTP, dan RDP. Hasilnya, BRAC berhasil meraih kepercayaan dari berbagai donor dan pemerintah, serta memperkuat hubungan dengan komunitas lokal. Melalui struktur internal yang jelas dan kebijakan manajemen yang transparan, BRAC dapat menjalankan perannya sebagai jembatan bantuan internasional ke Bangladesh secara efektif.

Kata Kunci: Akuntabilitas, BRAC, NGO, Pemerintah, Donor, Masyarakat.

Abstract. BRAC is a non-governmental organization (NGO) that emphasizes accountability in its relationships with the government, donors, and the community. BRAC's accountability towards the government is demonstrated through compliance with regulations, annual report publications, and close cooperation with the NGO Affairs Bureau of Bangladesh (NGOAB). Accountability to donors is realized through financial transparency and performance reports, which led to the establishment of an internal control department. Additionally, BRAC strives to achieve social accountability by engaging local communities through programs such as Outreach, RCTP, and RDP. As a result, BRAC has successfully gained the trust of various donors and governments, as well as strengthened its relationship with local communities. With a clear internal structure and transparent management policies, BRAC effectively serves as a bridge for international aid to Bangladesh.

Keywords: Accountability, BRAC, NGO, Government, Donors, Community.

Receive: October 3, 2024

Revision: October 6, 2024

Accepted: October 22, 2024

Copyright©2024. Muhammad Aditya Purnomo

This is an open access article under the CC-BY NC-SA license

DOI: <https://doi.org/10.1234/ssrj.v1i1.2>

Pendahuluan

Sejak tahun 1980an, jumlah eksistensi NGO di dunia semakin meningkat. Tahun-tahun tersebut dianggap sebagai “golden age of the international NGO (non-governmental organization)”. Pada tahun 1980an, terdapat sedikitnya 38,000 NGO yang bergerak di lebih dari satu negara. Satu dekade setelahnya, tercatat jumlah tersebut meningkat dua kali lipat (Agg, 2006). Salah satu dari sekian banyak NGO tersebut adalah BRAC. BRAC didirikan pada Januari 1972 di Bangladesh oleh Fazle Hasan Abed. Tujuan

Correspondence Muhammad Aditya Purnomo  Email: muhammadadityapurnomo@fisip.unsri.ac.id

Analisa Akuntabilitas International Non-Governmental Organization: Studi Kasus BRAC

awal didirikannya organisasi ini adalah merehabilitasi wilayah *Sulla*. Setahun setelahnya, sejumlah 14.000 rumah berhasil dibangun ulang, bersamaan dengan ratusan perahu yang dibuat untuk para nelayan. Disamping itu, pusat kesehatan dan pelayanan berhasil didirikan. Kemudian BRAC mengubah statusnya menjadi organisasi pembangunan. (Ahmed et al, t.t). BRAC sendiri memiliki misi utama untuk membantu masyarakat yang menghadapi situasi kemiskinan, ketidak-adilan sosial, dan lain sebagainya. Visi mereka adalah dunia yang bebas dari segala bentuk diskriminasi dan eksploitasi, dimana didalamnya setiap manusia memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensi mereka (BRAC, 2015).

Organisasi ini tercatat sebagai yang terbesar di negaranya, didukung oleh hampir 28.000 staf, dan lebih dari 200.000 orang yang terlibat dalam proyek-proyeknya. Proyek yang dijalankan oleh BRAC melibatkan sejumlah universitas, bank, penyedia layanan internet, dan berbagai organisasi bantuan lainnya. BRAC sendiri merupakan sebuah perwujudan terkait besarnya pertumbuhan yang dialami NGO. Di beberapa wilayah Bangladesh, kata “NGO” sendiri menjadi marak di telinga masyarakat. Kalimat-kalimat seperti “sekolahkan anakmu di sekolah milik NGO”, “banyak pilihan bank-bank milik NGO”, “ada hiburan yang diselenggarakan oleh NGO”, dan lain sebagainya, sudah terbilang umum. (Agg, 2006)

Tahun 1980an juga merupakan tahun-tahun dimana NGO dianggap sebagai badan penyalur bantuan yang lebih efektif dari segi biaya ketimbang negara. NGO juga dianggap mampu mencapai kalangan masyarakat hingga kebawah (Agg, 2006). Meningkatnya jumlah NGO di dunia juga diiringi dengan meningkatnya dana yang disalurkan melaluinya. Berdasarkan data dari OECD, terdapat peningkatan proporsi dana bantuan dari negara-negara anggotanya yang disalurkan melalui NGO, yakni dari 0.7 persen di tahun 1975 menjadi 3.6 persen di tahun 1985, serta kenaikan sebesar 5 persen dari tahun 1993 hingga 1994. Pendanaan NGO serta pertumbuhannya yang pesat bukanlah fenomena baru. Namun dari maraknya pendanaan tersebut, timbul sejumlah pertanyaan terkait akuntabilitas NGO. (Edward dan Hulme, 1996). Sebagai tambahan, pihak United Nations Research Institute for Social Development (UNRISD) sendiri mengkritik NGO terkait akuntabilitas dan legitimasi mereka. Pihak NGO sendiri mulai menyadari munculnya pertanyaan-pertanyaan tersebut. (Agg, 2006).

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis merumuskan sebuah pertanyaan penelitian yakni bagaimana BRAC membuktikan akuntabilitas organisasinya? Dalam hal ini, penulis berargumen bahwa BRAC berhasil membuktikan akuntabilitas mereka melalui performa, transparansi, hingga kepatuhan terhadap badan-badan yang berwenang.

Konsep akuntabilitas berarti bagaimana organisasi tersebut melaporkan hasil kerja mereka kepada pihak yang berwenang, serta bagaimana mereka bertanggung jawab terhadapnya. Akuntabilitas sendiri berpengaruh penting terhadap legitimasi. Akuntabilitas yang efektif membutuhkan tujuan yang jelas, transparansi dalam pengambilan keputusan, kejujuran dalam melaporkan penggunaan sumber daya, serta kejujuran dalam melaporkan pencapaian. NGO sendiri memiliki dua arah akuntabilitas, yakni “downwards”, dan “upwards”. Akuntabilitas “downwards”, atau kebawah, berarti mengarah ke staf, masyarakat, serta partner mereka. Akuntabilitas “upwards”, atau keatas, berarti mengarah ke pihak pemberi donor atau bantuan, serta pihak pemerintahan. (Edward dan Hulme, 1996).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menganalisis akuntabilitas organisasi BRAC. Studi kasus dipilih karena memungkinkan peneliti untuk melakukan eksplorasi secara mendalam mengenai konteks, dinamika internal, serta mekanisme pelaporan dan tanggung jawab organisasi dalam situasi nyata (Yin, 2018). Studi kasus ini juga memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana BRAC menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas baik ke arah upwards (pihak donor dan pemerintah) maupun downwards (masyarakat, staf, dan mitra), sejalan dengan kompleksitas yang kerap dijumpai dalam organisasi non-pemerintah yang memiliki banyak pemangku kepentingan (Creswell, 2014). Penelitian ini menggunakan desain deskriptif-eksploratif yang berfokus pada pemaparan fenomena yang kompleks dan memerlukan pemahaman mendalam terhadap dinamika antaraktor dalam suatu organisasi (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2019). Desain ini dipilih agar dapat mengeksplorasi bagaimana BRAC mempertahankan legitimasi dan transparansi organisasinya di tengah berbagai tantangan yang dihadapi oleh NGO.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumen dan observasi partisipatif. Studi dokumen melibatkan analisis terhadap laporan tahunan BRAC, laporan audit, dan evaluasi proyek untuk memverifikasi informasi yang relevan serta memahami kebijakan akuntabilitas organisasi (Bowen, 2009). Dokumen yang dikaji meliputi publikasi internal BRAC, laporan dari lembaga donor, serta dokumen kebijakan yang terkait dengan pelaksanaan proyek-proyek BRAC. Observasi partisipatif dilakukan dengan mengikuti beberapa kegiatan BRAC, seperti pertemuan evaluasi proyek dan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk menangkap interaksi antara BRAC dan para pemangku kepentingan dalam konteks operasional sehari-hari, sehingga dapat memahami secara lebih mendalam bagaimana prinsip-prinsip akuntabilitas diterapkan dalam praktik (DeWalt & DeWalt, 2011). Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan analisis tematik, yang membantu dalam mengidentifikasi dan melaporkan pola yang muncul dari data kualitatif secara sistematis (Braun & Clarke, 2006). Dengan pendekatan ini, penelitian dapat memberikan pemahaman holistik terkait praktik akuntabilitas BRAC sebagai salah satu NGO terbesar di dunia.

Pembahasan

Akuntabilitas BRAC terhadap Pemerintah

Pada praktik pelayanan serta advokasinya, BRAC cenderung memperhatikan akuntabilitas misi-misi mereka. Mereka menyadari bahwa akuntabilitas mereka harus mampu menunjukkan keterbukaan, integritas politik, serta kualitas mereka. Dalam hal ini, mereka harus mampu menjauhi berbagai tindakan yang menjatuhkan nama mereka, seperti nepotisme, pengambilan keputusan yang tidak partisipatif, serta program kerja yang kurang konsisten. (Ahmed et al, 2015).

Dalam menunjukkan akuntabilitasnya ke pihak pemerintah, BRAC cenderung menjaga hubungan baik dengan pemerintah, serta mematuhi aturan-aturan yang berlaku. Sejak tahun 1990, BRAC secara rutin menerbitkan laporan tahunan yang berisikan pendanaan serta tujuan program kerjanya, meskipun pada detailnya tidak selengkap laporan yang diterbitkan masa kini.

Pada tahun 1990, pemerintah Bangladesh mendirikan NGO Affairs Bureau of Bangladesh (NGOAB) guna meregulasi pergerakan NGO di negaranya. NGOAB sendiri meregulasi NGO yang tercatat menerima dana donor internasional. Setiap NGO yang bersangkutan harus menyerahkan laporan audit tahunan beserta laporan keuangan agar pendanaan internasional dapat disetujui oleh pemerintah. Disamping itu, NGOAB bertugas mengawasi serta menginspeksi proyek-proyek NGO tersebut. Fungsi NGOAB sendiri lebih ditekankan ke aspek finansial dan akuntabilitas NGO yang terlibat, yakni bagaimana mereka menggunakan anggaran yang diterima, dan apakah tindakan mereka sesuai dengan instruksi yang ada. Dalam hal ini, BRAC, sebagai salah satu NGO penerima donor internasional, secara rutin mengikuti instruksi NGOAB termasuk dalam hal melaporkan kinerjanya. Tercatat bahwa NGOAB tidak pernah menemukan permasalahan dalam tiap laporan yang diberikan. Sebagai tambahan, sejak tahun 1990, BRAC selalu menyediakan laporan aktivitas yang dapat diakses di kantor pusat mereka, namun penggerakannya bukanlah pemerintah maupun NGOAB, melainkan pihak pendonor. Kepala bagian finansial BRAC menyatakan:

“It is the donors, not the governments or NGOAB, that influenced us to prepare and publish annual activity reports...”

Meski demikian, hubungan baik antar BRAC dan pemerintah tetap terjaga. Hal ini didukung dengan kepatuhan dan transparansi BRAC terhadap pihak pemerintah (Ahmed et al, 2015).

Pada akhirnya, BRAC mampu untuk semakin meningkatkan akuntabilitas mereka, dan membuktikannya kepada pihak donor serta pemerintah. Disamping itu, mereka dapat dengan mudah menunjukkan efisiensi kerja mereka, yang kedepannya akan mampu mengangkat nama baik mereka terhadap pihak-pihak pendonor. (Ahmed et al, 2015).

Akuntabilitas BRAC terhadap Donor

Selain terhadap pemerintah, BRAC juga menunjukkan akuntabilitasnya terhadap pihak donor. Pada tahun 1988, BRAC mendirikan departemen kontrol internal. Hal ini dikarenakan semakin banyaknya dorongan dari pihak donor yang menginginkan bukti pencapaian serta laporan aktivitas BRAC. Selain guna memenuhi akuntabilitas organisasi, departemen tersebut didirikan untuk memonitor efisiensi pelayanan.

Guna menjaga kesinambungan arus informasi antara BRAC dan pihak pendonor, pada tahun 1990 didirikan badan Donor Liaison Office (DLO). Disamping itu, DLO berfungsi mengkoordinasi bantuan teknis, evaluasi proyek, melacak arus dana dari pihak donor, serta memfasilitasi konsorsium. DLO sendiri merupakan konsorsium yang didirikan atas dasar pihak Netherlands Organisation for International Development Cooperation, yang merupakan penyokong dana program RCTP dan RDP sejak lama, tidak mampu membiayai RDP secara penuh. DLO sendiri menjembatani bantuan dari agensi-agens bilateral dari berbagai negara berkembang. DLO menilai bahwa laporan BRAC terkait keuangan proyek dan perkembangan statistiknya bersifat transparan dan efektif, didukung dengan adanya audit yang dilakukan berbagai firma akuntan. Meskipun kemampuan DLO dalam menganalisa banyaknya NGO cukup terbatas, BRAC tetap mampu mendemonstrasikan kapasitasnya dalam menunjukkan akuntabilitasnya terhadap para donor. Keuntungan yang diperoleh BRAC dalam hal ini adalah semakin mudahnya BRAC untuk berdialog dengan para donor, yang kemudian memprioritaskan

BRAC untuk menerima proyek ketimbang organisasi pemerintahan maupun NGO lain. Disamping itu, donor semakin percaya untuk menyalurkan dana serta bernegosiasi dengan BRAC. Arus sumber daya menjadi semakin jelas, serta BRAC semakin dipercaya sebagai jembatan antara donor dan pemerintah. BRAC sendiri telah menjalin hubungan baik dengan berbagai NGO internasional, seperti Oxfam, World Vision, Save the Children, CARE, Fair Trade, dan Transparency International. NGO tersebut mampu memberikan pengaruh serta akses media yang memungkinkan berkurangnya intervensi pemerintah terhadap BRAC (Ahmed et al, 2015).

Akuntabilitas BRAC ke Masyarakat

Disamping pembuktian akuntabilitas ke pemerintah dan donor, BRAC juga menganggap akuntabilitas ke masyarakat sama pentingnya. Meskipun demikian, pendekatan BRAC terhadap golongan masyarakat terbilang cukup kompleks. Terdapat berbagai tantangan yang dihadapi BRAC terkait hubungannya dengan komunitas masyarakat, salah satunya adalah kepentingan antara pihak donor dan kepentingan masyarakat yang tidak sejalan. Contohnya adalah program pembangunan pedesaan di Sula yang melibatkan partisipasi masyarakat. Gagalnya program tersebut dikarenakan penduduk setempat merasa keuntungan dari rencana pembangunan tersebut akan tidak merata dan menguntungkan pihak donor yang memiliki kepentingan di daerah tersebut. Disamping itu, mereka menganggap kemungkinan korupsi masih tinggi. Meski demikian, BRAC tidak berhenti merancang program yang mampu menjangkau kalangan masyarakat. Salah satu anggota senior BRAC menyatakan:

“We tried various models to reach the poor for their empowerment. Our initial model failed but we didn’t stop trying new things.”

Kegagalan pada program di Sula mendorong BRAC untuk melakukan pendekatan yang berbeda dalam menghadapi masyarakat dan donor. Memberikan kuasa berlebih kepada pihak donor bukanlah hal yang tepat. Kelompok dengan finansial tinggi yang memiliki kepentingan tertentu berkemungkinan menghambat proses pembangunan. Kemudian BRAC merumuskan program Outreach dan program RCTP (Rural Credit and Training Programs). Program-program tersebut dirumuskan berdasarkan 2 (dua) opini yang berlawanan, yakni: 1) Sekedar bantuan finansial hanya akan mengakibatkan ketergantungan. Bantuan harus lebih kepada mengarahkan mereka untuk memanfaatkan sumber daya yang ada; 2) BRAC harus langsung memberikan bantuan dana kepada mereka, dan juga membantu membangun institusi-institusi lokal. Program pertama, yakni Outreach, dijalankan berdasarkan pendekatan kemandirian masyarakat. Bantuan ekonomi langsung bukan prioritas program ini, melainkan lebih kepada membantu mereka memberdayakan sumber daya serta kemampuan finansial yang tersedia. Outreach memberikan pengarahan, pelatihan, skema menabung, solusi memecahkan masalah, serta bantuan yang bersifat logistik seperti halnya benih tanaman serta vaksin hewan yang disalurkan dari agensi-agensinya pemerintah. Program ini bertujuan melihat seberapa jauh mereka mampu bertahan tanpa bantuan langsung tunai. Di tahun 1986, Outreach berhasil mengkoordinir sejumlah 45.000 penduduk di 462 desa. Total tabungan mereka mencapai 75.000 dollar AS. (Ahmed et al, 2015).

Program RCTP, di sisi yang berbeda, mengedepankan bantuan pinjaman tunai, namun didasari berbagai syarat yang berlaku. Bantuan diserahkan kepada berbagai organisasi, lalu disalurkan kepada tiap individu. Kemudian tiap organisasi bertanggung

jawab mengembalikan dana pinjaman tersebut. Terkait hasil kedua program tersebut, BRAC melihat bahwa program Outreach tidak selancar RCTP dikarenakan Outreach dinilai kekurangan bantuan eksternal meskipun metode programnya dianggap bermanfaat. Program Outreach sendiri terinspirasi dari model kerja Grameen Bank, namun Outreach gagal karena kurangnya partisipasi, serta maraknya protes dari pihak masyarakat terhadap pihak elit. BRAC selanjutnya menggunakan pendekatan Outreach dan RCTP, dan merumuskan program RDP (Rural Development Program) di tahun 1986. Program ini mengedepankan pendekatan sosial, dan fokus pada pembangunan institusi, pelatihan, pendidikan, operasi kredit, lapangan pekerjaan, dan aspek kehidupan lainnya. Program ini didukung 38 kantor wilayah, dan 1.800 organisasi masyarakat. RDP didasari anggapan tentang kredit mikro sebagai solusi melawan kemiskinan, serta mengesampingkan elemen politik dalam menangani masyarakat pedesaan. Disamping itu, BRAC merumuskan program Rural Enterprise Program (REP) guna mengembangkan sumber pendapatan wilayah pedesaan dengan cara berbisnis. RDP dan REP gagasan BRAC mengindikasikan akuntabilitas identitas organisasinya. Pada program-program tersebut, tujuan jangka-panjang BRAC terpapar didukung dengan pendekatan yang terbuka dan fleksibel (Ahmed et al, 2015).

Laporan tahunan BRAC sejak tahun 1990an secara eksplisit menyatakan bahwa tujuan mereka terfokus pada '*poverty alleviation*', dan '*women empowerment*'. Program-program mereka didukung adanya bantuan dari donor internasional, seperti program Local Democracy Education Program di tahun 1996 yang didukung oleh USAID dan Asia Foundation Support. Keberhasilan program-program BRAC, terutama di sektor pembangunan, kesehatan, pendidikan, serta pelatihan, membuatnya mendapat popularitas serta dukungan yang lebih ketimbang pemerintah. Disamping itu, BRAC dianggap lebih dekat dengan masyarakat lokal, serta dinilai lebih mampu melayani sesuai kebutuhan. Popularitas tersebut semakin memperkuat nama BRAC, sekaligus memperkuat kekuatan dan pengaruh sosialnya. (Ahmed et al, 2015).

Kejelasan Struktur Internal sebagai Pendorong Akuntabilitas

Akuntabilitas BRAC didukung dengan adanya struktur kepemimpinan yang jelas didalamnya. Perangkat kepemimpinan BRAC yakni: *Governing Body (GB)*, *an executive director (ED)*, *an advisor*, *deputy EDs*, and *directors*. Posisi tertinggi berada di GB, yang bertanggung jawab untuk menunjuk *chairperson*. Disamping itu, GB bertanggung jawab menjaga akuntabilitas BRAC terhadap para *stakeholders*, merumuskan kebutuhan pendanaan, menunjuk auditor, serta menyetujui maupun meninjau proyek. Kepemimpinan yang efektif serta kemampuan memecahkan masalah yang baik dan audit sosial, mampu menarik minat agensi-agensi internasional, memperluas kontak-kontak eksternal penting, serta meningkatkan akuntabilitas. Sebagai tambahan, pertemuan rutin diadakan tiap 2 (dua) bulan sekali. Program utama BRAC, yakni The BRAC Development Program, melibatkan 70% dari sumber daya dan anggota yang ada. Program ini merupakan program yang menjadi akar program-program BRAC. Didalamnya melibatkan Manager Divisi dan Manager Regional. Sebanyak 15% berada di kantor, dan sisanya bergerak di lapangan. Manager regional mengontrol aktivitas lapangan di tiap area, yang meliputi 8-10 area untuk tiap manager. Cakupan tersebut meliputi 40 hingga 50 desa, yang diperkirakan berisikan 100 organisasi masyarakat, yang berjumlah 6.000 hingga 7.000 total anggota. Dalam hal ini, hubungan antara organisasi

masyarakat dan BRAC dijaga oleh para Program Organisers. (Ahmed et al, 2015). Guna memastikan kualitas pegawainya, HRD BRAC merekrut anggota-anggotanya dari lulusan baru universitas, dan memberikan pelatihan organisasi guna menanamkan keterampilan manajemen yang partisipatif serta fleksibel. Sebanyak 7% dari anggaran BRAC digunakan untuk melatih dan mengembangkan anggotanya. Dalam hal ini, BRAC sendiri dianggap sebagai *learning organization*. Partisipasi merupakan aspek penting dalam struktur organisasi BRAC. Berikut komentar dari BRAC Micro Finance Program Head:

“BRAC tries to minimise the negative aspect of hierarchical behaviour by the flatness of its structure, its participatory training, participation ... and feedback systems. A key ... is a continuous round of work or issue-centred staff meetings ... everyone is asked to participate.”

Metode tersebut dianggap memberikan perasaan keterlibatan pada tiap anggota, tanpa memperhatikan tinggi-rendahnya jabatan mereka (Ahmed et al, 2015).

Guna menghadapi lingkungan yang keras serta tingginya kemungkinan korupsi, BRAC membutuhkan kontrol, struktur, serta aturan yang jelas. Guna meningkatkan lebih jauh akuntabilitas pegawai mereka, pada awal tahun 1990an BRAC mengimplementasikan evaluasi kinerja pegawai tahunan, rotasi staf rutin antar cabang, kunjungan lapangan rutin oleh anggota manajemen senior, pembentukan tim audit internal yang kuat, pengadaan audit eksternal tahunan, serta *self-regulation*. Dalam hal ini, pegawai senior BRAC berkomentar:

“good accounting and management information systems... are indicators of accountability.”

Tujuan implementasi tersebut ialah mengombinasikan akuntabilitas fungsional dan sosial guna meningkatkan keterbukaan pegawai BRAC terhadap kritik, maupun inspeksi dari pihak manapun, serta menata misi mereka. (Ahmed et al, 2015).

BRAC sebagai Jembatan Bantuan Australia ke Bangladesh: Salah Satu Catatan Performa BRAC

BRAC merupakan salah satu organisasi yang menjembatani bantuan dari Australia terhadap Bangladesh. Program yang dijalankan Australia meliputi komitmen untuk mengembangkan sektor pendidikan, lingkungan, serta kesehatan. BRAC dianggap mampu mencapai komunitas masyarakat hingga ke lokasi-lokasi yang sulit dicapai (AUSid, 2012). Pada tahun 2012, Australia merencanakan The Bangladesh Aid Program Strategy, yang diproyeksikan akan berjalan sejak tahun 2012 hingga tahun 2016 (DFAT, 2015). Disamping perencanaan tahun 2012-2016 tersebut, Australia di tahun 2015 juga menyalurkan bantuan terhadap Bangladesh guna membantu program rencana lima tahun Bangladesh ke-7 (Bangladesh Government’s Seventh Five Year Plan 2016–2020) (Bangladesh.embassy.gov.au, t.t).

Terkait akuntabilitas BRAC sendiri, perlu diperhatikan terkait laporan pencapaian, serta tujuan yang jelas dari NGO tersebut dalam menyalurkan bantuan dari Australia. Berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT), pada program The Bangladesh Aid Program Strategy, program-program dimana BRAC terlibat didalamnya, menunjukkan hasil rating yang baik, yang diindikasikan dengan rating warna hijau (*green*). Program-program tersebut antara lain: 1) *increased equity of access to, and improved outcomes from, health and education services*; 2) *Fewer women and men living in extreme poverty and vulnerable to economic and natural shocks*;

3) *Women and marginalised groups better able to demand and obtain services and assert rights*. Rating warna hijau berarti praktik manajemen program yang dijalankan (standard program management practices) terbilang mumpuni. Hasil rating tersebut kemudian dijabarkan secara elaboratif menurut ketiga program yang ada. Pertama, terkait peningkatan mutu sektor kesehatan dan pendidikan, Australia, didukung oleh BRAC, mampu mencapai hasil yang dikatakan signifikan. Anak-anak yang tidak memiliki akses pelayanan, terbantu oleh kerjasama tersebut. Tercatat sebanyak 364.494 anak-anak berhasil disekolahkan, di tingkat sekolah dasar, maupun pra-sekolah dasar. Tercatat pula sebanyak lebih dari 30.000 anak dengan disabilitas mendapatkan akses ke pendidikan sekolah dasar, dan pra-sekolah dasar. Disamping itu, sebanyak 12.670 guru berhasil mendapatkan pelatihan yang lebih baik, terkait kegiatan belajar-mengajar di tingkat sekolah dasar, dan di tingkat pra-sekolah dasar. Bantuan yang disalurkan Australia melalui BRAC dikatakan efisien, terutama karena BRAC mampu menjangkau lokasi-lokasi yang tidak terjangkau layanan pemerintah. Kedua, terkait bantuan kepada masyarakat golongan *extreme poverty*.

Performa BRAC dalam hal ini terbilang signifikan. Dalam praktiknya, BRAC merumuskan program CFPR-TUP, yang secara spesifik ditujukan kepada keluarga-keluarga yang tergolong *extreme poverty*. Hasilnya, sebanyak 280.000 jiwa berhasil merangkak naik dari garis kemiskinan tersebut. Program rumusan BRAC tersebut pada akhirnya juga digunakan secara global. Ketiga, terkait tujuan Australia melepaskan kaum perempuan, serta kaum-kaum termarjinalkan lainnya, dari jeratan ketidak-adilan pelayanan. Dalam hal ini, BRAC memiliki program CEP (Community Empowerment Programme), yang terfokus pada kaum-kaum termarjinalkan, khususnya perempuan. Australia sendiri memiliki tujuan menyetarakan gender, dan memperkuat peran perempuan di masyarakat Bangladesh. Pada praktiknya, BRAC menyadari bahwa aspek ini membutuhkan perhatian yang lebih. Maka dari itu, pada program CEP tersebut, BRAC mengadakan pertemuan bersama anggota masyarakat *polli shomaj*. Sebanyak 16.390 anggota masyarakat *polli shomaj* telah terlibat dalam pertemuan yang diadakan sebanyak 4.745 kali selama program berlangsung. (DFAT, 2015).

Disamping kesuksesan menangani bantuan dari Australia ke Bangladesh, BRAC tercatat telah memperoleh sejumlah penghargaan internasional terkait kinerja mereka. Tercatat per tahun 2015, BRAC telah memperoleh: 1) *The World Food Prize (October 2015)*. BRAC berkontribusi dalam distribusi makanan kepada masyarakat yang membutuhkan; 2) *World Toilet Organization Hall of Fame Award 2015 (January 2015)*. BRAC berkontribusi dalam memperbaiki kualitas sanitasi di Bangladesh secara signifikan, dan berhasil memperoleh penghargaan "Hall of Fame Award" dari World Toilet Organization (WTO); 3) *'RFL Inspiring Women Award (March 2015)*. BRAC dianggap sebagai organisasi yang sangat memperhatikan kaum perempuan di Bangladesh, yang tidak hanya memperhatikan perempuan di kalangan masyarakat, namun juga di lingkup internalnya. Selain memperoleh penghargaan atas kinerja, BRAC memperoleh penghargaan terkait transparansi mereka, yakni peringkat pertama pada *Institute of Cost and Management Accountants of Bangladesh (ICMAB) Best Corporate Award in the NGO sector for the year 2014*, dan peringkat kedua pada *Institute of Chartered Accountants of Bangladesh (ICAB) National Award under the category of NGOs for the year 2014*. (BRAC, 2015).

Kesimpulan

Penulis telah mampu mengidentifikasi bagaimana BRAC membuktikan akuntabilitasnya. Akuntabilitas BRAC mengarah dua arah, yakni: 1) Mengarah keatas (upwards) kepada pihak pemerintah dan donor. BRAC mampu membuktikan bahwa organisasinya akuntabel ke pemerintah, dengan keterbukaannya terkait laporan pekerjaan yang diserahkan ke NGOAB tiap tahunnya. Disamping itu, akuntabilitas BRAC ke pihak donor dibuktikan dengan transparansinya terhadap DLO. Dalam hal ini, nama BRAC akan semakin baik di kalangan agensi bantuan internasional, dan lebih memungkinkan untuk menerima berbagai proyek; 2) Mengarah kebawah (downwards) kepada masyarakat, serta staf internal mereka. Terkait akuntabilitas kepada masyarakat, BRAC memang mengedepankan pendekatan yang cukup kompleks, dikarenakan reaksi masyarakat terhadap berbagai program kerja BRAC tidak selalu partisipatif. Namun seiring meningkatnya performa BRAC dengan program RDP dan REP, kepercayaan masyarakat meningkat dikarenakan luasnya sektor yang dicakup dan dibangun oleh BRAC di program tersebut. Kemudian terkait akuntabilitas staf internal mereka, BRAC menekankan sistem kerja partisipatif, dimana seluruh jajaran staf internal, tanpa memandang tinggi-rendahnya jabatan mereka, mampu untuk berpartisipasi dalam program kerja. Disamping itu, dengan adanya evaluasi, rotasi antar cabang, serta berbagai pelatihan, BRAC mampu untuk semakin meningkatkan sistem informasi dan transparansi keuangan mereka, yang juga merupakan indikator akuntabilitas. Pada salah satu kasus yang ditangani BRAC, yakni bantuan Australia terhadap Bangladesh, terlihat bahwa BRAC mampu menunjukkan performa nyata mereka dalam mewujudkan ketiga sasaran yang ditetapkan Australia dalam program The Bangladesh Aid Program.

Referensi

- Agg, C. (2006). Trends in Government Support for Non-Governmental Organizations: Is the “Golden Age” of the NGO Behind Us? Civil Society and Social Movements Programme Paper Number 23 June 2006.
- Ahmed, Z., Hopper, T., & Wickramasinghe, D. (2015). The BRAC Independence Movement: Accountability to Whom? SSRN Electronic Journal. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2609838>
- Ahmed, Z., Hopper, T., & Wickramasinghe, D. (n.d.). Hegemony and Accountability in BRAC – the Largest Hybrid NGO in the World.
- AusAID. (2012). Australia–Bangladesh Aid Program Strategy (2012–16).
- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27-40. <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77-101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp0630a>
- BRAC. (2015). INGO Accountability Report. BRAC.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- DeWalt, K. M., & DeWalt, B. R. (2011). *Participant observation: A guide for fieldworkers*. Rowman Altamira.
- DFAT. (2015). *Aid Program Performance Report 2014-15: Bangladesh November 2015*. Department of Foreign Affairs and Trade.

- Edwards, M., & Hulme, D. (1996). Too close for comfort? The impact of official aid on nongovernmental organizations. *World Development*, 24(6), 961-973. [https://doi.org/10.1016/0305-750X\(96\)00019-8](https://doi.org/10.1016/0305-750X(96)00019-8)
- Kvale, S., & Brinkmann, S. (2015). *InterViews: Learning the craft of qualitative research interviewing* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Saunders, M., Lewis, P., & Thornhill, A. (2019). *Research methods for business students* (8th ed.). Pearson Education Limited.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications.